

BAB III

“KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH FILIPINA TERHADAP ABU SAYYAF”

Sejak awal berdirinya Abu Sayyaf Pemerintah Filipina merespon apa yang dilakukan oleh Abu Sayyaf. Pada tahun 1993 Pemerintah Filipina bersama dengan ASEAN sebagai mediator pada tanggal 30 Agustus 1996 yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta antara ketua salah satu organisasi dari Bangsa Moro dengan Presiden Filipina Fidel Ramos yang berisi tujuan untuk meredam konflik pemerintah dengan Muslim Moro. Akan tetapi, hasil dari perjanjian tersebut ternyata masih memperlihatkan ketidakpastian nasib dari Bangsa Moro karena masih adanya ketegangan yang terjadi antara kedua pihak.

Banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Abu Sayyaf. Seperti melakukan serangan – serangan yang ditujukan kepada Abu Sayyaf. Selain itu Filipina juga melakukan kerjasama dengan negara lain dalam menghadapi Abu Sayyaf. Kerjasama dilakukan salah satunya dengan Amerika Serikat. Permasalahan tentang kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Amerika Serikat setelah terjadi tragedi 9/11 WTC telah membuat dampak perubahan yang sangat terlihat dan signifikan pada penetapan dan penerapan hukum yang ada di dunia. Serangan terror yang terjadi telah memunculkan persepsi bahwa ancaman – ancaman dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Hubungan bilateral yang terjalin antara Amerika Serikat dan Filipina yang sudah berlangsung sejak lama bahkan sebelum tragedi 9/11 terjadi. Awalnya dimulai sejak kolonialisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Filipina pada tahun 1905. Setelah Filipina menjadi negara merdeka hubungan antara kedua negara tersebut masih berjalan sangat baik. Hubungan yang dilakukan antara kedua negara berlanjut dengan munculnya sebuah kerjasama tentang menangani masalah terorisme,

yang ditunjukkan dengan perjalanan Presiden Filipina Gloria Macapagal menuju Amerika Serikat pada November tahun 2001. Hubungan yang dilakukan antara kedua negara berlanjut dengan munculnya sebuah kerjasama tentang menangani masalah terorisme, yang ditunjukkan dengan perjalanan Presiden Filipina Gloria Macapagal menuju Amerika Serikat pada November tahun 2001 yang menghasikan sebuah keputusan bahwa kedua Negara sepakat melakukan kesepakatan perjanjian yang bergerak dalam kerjasama militer, yang di mana kerjasama tersebut dilakukan sebagai salah satu tindakan untuk membantu Filipina yang dilakukan Amerika Serikat. Tindakan tersebut bertujuan untuk memperkuat pasukan militer Filipina untuk berperang melawan terorisme serta dilakukan juga untuk melakukan perlawanan terhadap aksi – aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf yang selalu meresahkan Pemerintah Filipina dan mengganggu kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat di Filipina.

Selain melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat Filipina juga bekerjasama dengan organisasi regional Asia Tenggara yaitu ASEAN. Semenjak tahun 2002 ASEAN sudah mengarah ke konsentrasi dalam menyelenggarakan tindakan untuk membentuk rancangan kerja hukum regional yang berfungsi sebagai penghubung undang – undang tentang penolakan aksi terorisme sebagai dasar dalam melakukan kerjasama antara Negara ASEAN. Pada bulan Mei tahun 2002, terjadi penandatanganan *Agreement on Exchange and Establishment of Communication Procedures* yang dilakukan oleh pemerintah Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Akan tetapi ASEAN belum mempunyai peran yang menonjol untuk berupaya menangani kasus terorisme kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Meskipun ASEAN sudah mendirikan persatuan yang bersifat mengikat dalam *ASEAN Community*, tanggapan dari pihak ASEAN saat menanggapi aksi terorisme Kelompok Abu Sayyaf di Filipina sebatas dalam tingkat nasional dan sub regional.

A. Upaya Pemerintah Filipina dalam Menangani Kasus – Kasus Abu Sayyaf

Filipina merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan gugusan pulau di Asia Tenggara. Filipina memiliki luas wilayah sebesar 300.000 km², Letak astronomis Filipina yaitu terletak di 4° 40' LU – 21° 10' LU dan 116°40'BT -126°34' BT. Sedangkan letak secara geografis wilayah Filipina berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, sebelah Barat Filipina berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan di Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Filipina sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Daerah wilayah Filipina pun tidak ada yang berbatasan langsung dengan daratan wilayah negara lain. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan juga negara yang memiliki garis pantai terpanjang kelima di dunia dengan panjang garis pantai sepanjang 36.289 km. Negara ini mempunyai banyak pulau sejumlah 7.107 pulau. Filipina memiliki jumlah penduduk sebanyak 102.624.209 jiwa. Penduduk yang tinggal di Filipina mayoritas memeluk agama Katolik sebanyak 82,9% dan sisanya memeluk Agama Islam dan agama lainnya. Bahasa resmi yang digunakan oleh penduduk Filipina ada dua yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Tagalog yang merupakan bahasa asli dari Filipina.

Filipina pernah dijajah dan dikuasai oleh kolonialis Spanyol selama 265 tahun yang menduduki wilayah Filipina dari tahun 1565 hingga tahun 1821. Akan tetapi, pada tahun 1898 terjadi perang antara Spanyol dan Amerika Serikat yang saat itu dimenangkan oleh Amerika, setelah itu berhasil untuk menguasai Filipina dan menjadikannya sebagai salah satu negara jajahan dan bergabung di negara persemakmuran di bawah Amerika Serikat pada tahun 1934. Selain dua negara tersebut Filipina juga pernah dijajah oleh Negara Jepang saat Perang Dunia kedua. Pada akhirnya

Filipina memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1946 yang didapat dari Amerika Serikat. (Bahaduri, 2017)

Di Filipina terdapat sebuah kelompok yang di dalamnya terdapat penduduk Filipina yang beragama Islam. Kelompok tersebut dinamakan dengan kelompok Moro atau sering disebut dengan Bangsa Moro. Bangsa Moro ini mayoritas tinggal di wilayah Filipina bagian selatan. Kelompok tersebut dianggap sebagai sebuah kelompok marginal bagi pemerintah Filipina. Oleh Pemerintah Filipina Bangsa Moro ini dijadikan sebagai kelompok / suku yang terpinggirkan, tindakan tersebut mulai terjadi dari masa penjajahan Kolonial Spanyol hingga Filipina merdeka.

Dengan adanya hal tersebut Bangsa Moro berusaha untuk mencari keadilan bagi kelompok mereka terhadap Pemerintah Filipina. Tindakan – tindakan untuk upaya mencari keadilan dilakukan oleh Bangsa Moro. Hingga mereka mendirikan organisasi – organisasi yang bertujuan untuk melawan ketidakadilan dari Pemerintah Filipina. Salah satu organisasi yang dibentuk oleh Bangsa Moro yaitu Abu Sayyaf. Abu Sayyaf yang berdiri pada tahun 1991 ini merupakan sebuah organisasi kecil yang bersifat radikal dalam setiap tindakan yang dilakukan. Abu Sayyaf selalu menggunakan tindakan kekerasan serta ekstrim seperti penyerangan penculikan, pengeoman, dan penyanderaan.

Sejak awal berdirinya Abu Sayyaf Pemerintah Filipina merespon apa yang dilakukan oleh Abu Sayyaf. Pada tahun 1993 Pemerintah Filipina bersama dengan ASEAN sebagai mediator pada tanggal 30 Agustus 1996 yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta antara ketua salah satu organisasi dari Bangsa Moro dengan Presiden Filipina Fidel Ramos yang berisi tujuan untuk meredam konflik pemerintah dengan Muslim Moro. Akan tetapi, hasil dari perjanjian tersebut ternyata masih memperlihatkan ketidakpastian nasib dari Bangsa Moro karena masih adanya ketegangan yang terjadi antara kedua pihak. Salah satu pihak dari Bangsa Moro menginginkan penyelesaian secara diplomatik, sementara di sisi lain mengehndaki perjuangan

dengan tetap dengan gencatan senjata yang dilakukan oleh Abu Sayyaf. Pada akhirnya pihak pemerintah Filipina melakukan tindakan bersifat represif dengan cara pendekatan militer di wilayah mayoritas muslim yang bertujuan untuk menumpas kelompok radikal tersebut. Dengan demikian merupakan cara yang paling efektif dan tepat dalam menyelesaikan konflik bangsa Moro, pada saat mereka berjuang sendiri sehingga dapat dengan mudah dikendalikan oleh pemerintah. Untuk pertama kalinya perwakilan dari Abu Sayyaf dan juga Filipina melakukan perundingan resmi pada tahun 1997. Beberapa kali perundingan antara kedua belah pihak sukses untuk melakukan perdamaian. Namun, beberapa kali juga kesepakatan damai yang dilakukan gagal dalam realisasi perdamaian jangka panjang karena akibat terjadinya kembali tindakan – tindakan kekerasan dengan menggunakan senjata yang dilakukan oleh kelompok radikal Abu Sayyaf. (Gofur, 2016)

Banyak tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Abu Sayyaf.



Gambar 3.2: Hubungan yang terjadi antara Filipina dan Amerika Serikat (Deutsche Welle, 2014)

Seperti melakukan serangan – serangan yang ditujukan kepada Abu Sayyaf. Selain itu Filipina juga melakukan kerjasama dengan negara lain dalam menghadapi Abu Sayyaf. Kerjasama dilakukan salah satunya dengan Amerika Serikat.

Permasalahan tentang kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Amerika Serikat setelah terjadi tragedi 9/11 WTC telah membuat dampak perubahan yang sangat terlihat dan signifikan pada penetapan dan penerapan hukum yang ada di dunia. Serangan terror yang terjadi telah memunculkan persepsi bahwa ancaman – ancaman dapat terjadi kapan saja di mana saja dan dapat menyebabkan suasana tidak aman serta tidak mudah untuk diprediksi dengan tepat. Karena dari tindakan – tindakan terorisme internasional yang telah menyebar di berbagai wilayah di dunia. Terkhusus dengan apa yang berkaitan dengan adanya kelompok radikal di Filipina yang berkaitan dengan keamanan dunia (*security*). Tragedi yang telah terjadi pada 11 September tahun 2001 telah menyebabkan dampak terhadap perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada tindakan – tindakan terorisme yang telah terjadi maupun yang akan datang.

Hubungan bilateral yang terjalin antara Amerika Serikat dan Filipina yang sudah berlangsung sejak lama bahkan sebelum tragedi 9/11 terjadi. Awalnya dimulai sejak kolonialisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Filipina pada tahun 1905. Setelah Filipina menjadi negara merdeka hubungan antara kedua negara tersebut masih berjalan sangat baik. Seperti pasukan militer dari Amerika Serikat sering melakukan pelatihan militernya yang berpusat di wilayah Filipina. Semenjak kejadian 9/11 di WTC, Pemerintah Amerika Serikat membuat gagasan yang bertujuan untuk menghadapi ancaman atas terorisme yang terjadi. Gagasan yang telah dibuat tersebut langsung mendapat respon yang positif yaitu pemerintahan Filipina menyetujui serta memberi dukungan sangat baik terhadap gagasan tersebut.

Kerja sama yang dilakukan antara kedua negara dalam bidang militer terus berlanjut sehingga membuat hubungan mereka semakin erat, terutama dalam bidang keamanan dan pertahanan negara. Seperti yang ditunjukkan oleh pemerintah Filipina yang saat itu pada era kepemimpinan Presiden Gloria Macapagal Arroyo memberikan dukungan dan rasa simpati paska kejadian 9/11, yang menghancurkan Gedung *World Trade Center* di New York dan Pentagon yang dilakukan dengan berbicara melalui telepon terhadap Presiden George Walker Bush yang merupakan Presiden Amerika Serikat pada saat itu. Presiden Filipina menyatakan simpati terhadap tragedi yang terjadi dan juga mendukung tentang ide strategi dari Presiden George Walker Bush untuk berperang melawan terorisme. Respon yang dilakukan oleh Gloria Macapagal Arroyo merupakan perwakilan pertama yang berasal dari pemerintah di wilayah Asia Tenggara tentang dukungan Gloria Macapagal Arroyo dalam perang untuk melawan aksi terorisme terhadap pemerintah Amerika Serikat.

Hubungan yang dilakukan antara kedua negara berlanjut dengan munculnya sebuah kerjasama tentang menangani masalah terorisme, yang ditunjukkan dengan perjalanan Presiden Filipina Gloria Macapagal menuju Amerika Serikat pada November tahun 2001 dengan tujuan untuk merayakan hubungan kerjasama yang dijalin antara Amerika Serikat dan Filipina pada bidang pertahanan yang telah berlangsung sejak 50 tahun yang lalu yaitu dengan nama *Mutual Defense Treaty* (MDT). Selain merayakan hal tersebut, para pemimpin dari kedua Negara sepakat melakukan kesepakatan perjanjian antar kedua negara yang bergerak dalam kerjasama militer, yang di mana kerjasama tersebut dilakukan sebagai salah satu tindakan untuk membantu Filipina yang dilakukan Amerika Serikat. Tindakan tersebut bertujuan untuk memperkuat pasukan militer Filipina untuk berperang melawan terorisme serta dilakukan juga untuk melakukaan perlawanan terhadap aksi – aksi terror yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf yang

selalu meresahkan Pemerintah Filipina dan mengganggu kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat di Filipina.

Dalam pertemuan sebelumnya, antara kedua pemerintah telah membentuk sebuah kerangka kerjasama legal untuk mengikutsertakan para anggota militer Amerika Serikat menuju ke wilayah Filipina untuk sebuah program yang bernama dengan persetujuan yang dilakukan bersama dengan nama *Visiting Forces Agreement* (VFA). Sebenarnya kedua negara sudah pernah melakukan kerjasama dalam bidang militer, akan tetapi kerjasama tersebut terhenti pada tahun 1991. Tak lama setelah itu kerjasama tersebut dilanjutkan, lalu pemerintah kedua negara membuat kerjasama yang baru di dalam VFA sebagai salah satu bagian dari program Amerika Serikat beserta Filipina yang dinamakan dengan “Joint Exercise” yang bertujuan untuk mendatangkan pasukan militer menuju Filipina.

Rencana Baliktan tersebut adalah salah satu bagian dari VFA rencana itu memiliki tujuan untuk memberi pelatihan kepada pasukan militer Filipina serta untuk membantu persenjataan dan perlengkapan perang militer Filipina sebagai alat untuk melakukan operasi yang merupakan strategi menghadapi Kelompok Abu Sayyaf di daerah Filipina bagian selatan yaitu di daerah Sulu, Basilan, dan daerah sekitarnya yang merupakan daerah basis dari Kelompok Abu Sayyaf. Pasukan militer Amerika Serikat yang ditempatkan di wilayah Filipina selatan adalah bentuk kerjasama koalisi yang dilakukan antar kedua negara tersebut untuk memberi pelajaran bagi militer bersenjata Filipina dengan memberi keahlian dan pengarahan dalam untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok terror. Selain memberikan pelatihan kepada pasukan militer Filipina kedatangan pasukan Amerika juga memberi banyak bantuan tentang strategi taktik, intelegensi, dan juga psikologi yang sebagai komponen atas strategi terbaru untuk melawan suatu peperangan. Selain itu juga berfungsi untuk menyerang pertahanan dari Kelompok Abu Sayyaf dengan

perlawanan yang dilakukan secara gerilya / sembunyi – sembunyi.

Bantuan kerjasama bilateral yang dihasilkan oleh kedua Negara selain bantuan dalam kerjasama militer, juga merupakan bagian mengenai rancangan economic power dengan cara memberikan program bantuan berupa finansial yang digunakan untuk membekali pembelajaran dalam pendidikan militer yang bertujuan untuk melawan serangan terror – terror oleh Amerika Serikat. Bantuan finansial tersebut merupakan dukungan untuk melengkapi perlengkapan logistik militer Filipina seperti peralatan perang, kendaraan perang untuk angkatan darat, udara, dan laut. Bantuan ekonomi yang diberikan Amerika Serikat juga digunakan sebagai mengatasi kehancuran dalam negeri Filipina yang menyebabkan kemerosotan ekenomian karena dampak dari apa yang dilakukan oleh kelompok terror dan kerusakan fasilitas – fasilitas umum seperti lapangan udara Davao yang disebabkan oleh Kelompok Abu Sayyaf. Karena adanya bantuan dana yang diberikan oleh Amerika Serikat sebagai sarana untuk pelatihan pasukan militer serta bantuan yang lainnya yang diberikan kepada Filipina sebagai program yang bertujuan untuk berperang melawan terorisme. Filipina merupakan Negara yang paling banyak diberi bantuan oleh Amerika Serikat dibandingkan dengan Negara – Negara lainnya yang ada di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Filipina juga memberikan timbal balik terhadap Pemerintah Amerika yaitu dengan menyediakan fasilitas bagi pasukan Amerika seperti pelabuhan dan lapangan udara sebagai transit dan berguna untuk mengawasi serta untuk berjaga – jaga dalam mengamankan keamanan kawasan Filipina beserta Negara – Negara yang berada disekitar Filipina dari ancaman terror yang dilakukan oleh Abu Sayyaf.

Pemerintah Filipina memperlihatkan kedekatan persahabatan diplomatic dengan pemerintah Amerika Serikat, yaitu seperti menunjukkan konsolidasi, efektivitas dalam kerjasama, serta kohesivitas ataupun keberadaan

Filipina yang merupakan negara pertama berasal dari Asia Tenggara yang dapat berkunjung ke Gedung Putih di Washington semenjak gantinya presiden Amerika Serikat menjadi Barrack Obama. Pada saat kunjungan diplomatik antara presiden Arroyo (Filipina) dengan Barrack Obama (Amerika Serikat) yang dimana pemimpin dari kedua negara membuat sebuah pernyataan bersama yaitu untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan kedua negara pada bidang anti terorisme.

Dengan adanya pergantian presiden Amerika Serikat menjadi Barrack Obama, tentu saja program untuk memerangi teroris tidak berhenti begitu saja. Adanya pertemuan yang terjadi antara presiden Filipina dan Amerika Serikat dalam bentuk pertemuan diplomatik yang terjadi pada Agustus 2009, membuahkan hasil yaitu kedua Negara melakukan komitmen dalam upaya untuk menjaga dan mengawasi menjaga keamanan regional wilayah sekitar dengan bersama – sama. Dalam pertemuan antar kedua Negara ini Presiden Barrack Obama berpesam kepada pemerintah Filipina sebagai perantara untuk menjalin hubungan kerjasama bersama regional beserta dengan para anggota ASEAN yang lain. Kedua pemerintah menekankan bahwa penting halnya untuk menjaga keamanan dan kestabilan kondisi regional Asia Tenggara terkhusus dari ancaman aksi terorisme. Dalam pertemuan yang berlangsung singkat tersebut juga membahas kesepakatan lain yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi dan lingkungan, akan tetapi topik yang fokus dibicarakan yaitu tentang bidang keamanan dan masalah terorisme di Asia Tenggara. (AsSakir, 2017)

B. Dukungan ASEAN terhadap Kebijakan Pemerintah Filipina dalam Menangani Abu Sayyaf



Gambar 3.3: Logo ASEAN sebagai simbol kerjasama Filipina dengan ASEAN
(Hargeulis, 2018)

Kelompok teroris yang tersebar di kawasan Asia Tenggara yaitu jaringan teroris yang tumbuh dan berkembang mulai dari kelompok Islam bersifat radikal. Hal tersebut dapat ditinjau atas berkembangnya kelompok – kelompok Islam yang bersifat radikal yang ada di wilayah Asia Tenggara sudah berkembang berubah menjadi kelompok teroris yang sudah melewati batas luar negara yaitu menjadi jaringan teroris dengan proporsi internasional. Kelompok Islam radikal berkembang menjadi jaringan teroris yang melewati batas luar negara dapat disebabkan atas peristiwa yang terjadi pada 11 September 2001 di gedung WTC Amerika Serikat. Pihak Amerika Serikat mencari Osama bin Laden yang memimpin Jaringan Al-Qaeda dan bertanggung jawab pada tragedy penyerangan yang menyebabkan runtuhnya gedung WTC. Pada saat pencarian serta perburuan terhadap Osama bin Laden, Amerika sadar kalau kelompok radikal Islam yang muncul di kawasan Asia

Tenggara saling berhubungan dan menjadi bagian dari Jaringan Al-Qaeda. Tahun 1990-an jaringan Al-Qaeda menyebarkan, mengembangkan serta mendirikan pemusatan pelatihan teroris dan memberi dana untuk pelatihan tersebut. Dengan adanya pemusatan pelatihan Al-Qaeda melakukan perekrutan kelompok Islam lokal yang terdapat di berbagai belahan dunia. Pusat pelatihan yang didirikan Al-Qaeda berada di Afghanistan ini sudah tersebar di kawasan Asia, Afrika Tengah dan Afrika Timur, serta Kaukasus.

Pada tahun 1990-an kamp pelatihan Al-Qaeda dan Taliban sudah memberikan pelatihan terhadap sekitar 190.000 remaja Muslim ditujukan untuk melakukan perjuangan di Filipina (Mindanao), Myanmar, Indonesia (Maluku dan Poso), China (Xinjiang), Bosnia, Kashmir, Kosovo, Dagestan, Chechnya, Nagorno-Karabakh, Mesir, Algeria, Yordania, dan Yaman, serta tempat – tempat lain di dunia. Usaha – usaha yang dilakukan Al-Qaeda inilah mendukung perkembangan atas gerakan kelompok islam radikal yang bertempat di Asia Tenggara yang telah berubah menjadi kelompok teroris yang sudah beraksi di wilayah Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Selain itu juga terdapat kelompok Islam radikal lain yang sudah berkembang menjadi kelompok teroris yaitu *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dan Kelompok Abu Sayyaf di Filipina, Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) di Malaysia, Laskar Jundullah di Indonesia, *Arakan Rohingya Nationalist Organization* (ARNO), Jemmah alafiyah di Thailand, *Rohingya Solidarity Organization* (RSO) di Myanmar serta jaringan Jemaah Islamiyah (JI) yang berkembang hingga ke Australia.

Organisasi teroris aktif yang ada di kawasan Asia Tenggara yang sering menyerang dan melakukan aksi – aksi terror yang merugikan Negara – Negara yang ada di Asia Tenggara. ASEAN yang menjadi wadah organisasi regional Asia Tenggara memiliki tujuan sebagai masyarakat yang berintegrasi untuk membentuk komunitas negara-negara di

Asia Tenggara dengan sifat terbuka, stabil, dan aman yang diikat ke dalam hubungan yang dinamis. Jaringan terorisme yang ada di daerah Asia Tenggara yang memiliki hubungan dengan Jaringan Teroris Al-Qaeda menjadi hambatan agar terwujudnya visi dari ASEAN. Ancaman serangan yang dilakukan oleh teroris yang terjadi di Asia Tenggara mengganggu kedamaian dan perkembangan pertumbuhan negara. Komunitas ASEAN yang terdiri dari 3 pilar yang pertama Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), kedua Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*), dan yang ketiga yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*). Pilar ASEAN sebagai sebuah Komunitas Keamanan pasti akan menanggapi isu terorisme yang terjadi. Isu tersebut menjadi bahasan yang sangat penting agar dapat terselesaikan. Dalam menanggapi isu terorisme yang terjadi setelah adanya tragedi WTC. ASEAN mengambil langkah awal untuk menghadapi peristiwa tersebut dilakukan penandatanganan *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* oleh Negara – Negara yang menjadi anggota ASEAN pada 5 November 2001. Terdapat lima poin utama dalam deklarasi, sebagai berikut:

1. Mengecam peristiwa serangan WTC 9/11 serta memikirkan kejadian serangan yang telah terjadi juga dapat dialami oleh semua Negara di dunia.
2. Melihat dan memperkuat mekanisme keamanan nasional untuk memerangi terorisme
3. Tidak memperbolehkan setiap upaya yang mengaitkan kejadian terorisme dengan agama ataupun ras apapun.
4. Menyuarakan kepada setiap Negara anggota supaya melakukan peningkatan untuk membagi informasi dan intelijen, serta kerjasama regional dalam menegakkan hukum.
5. Memerintahkan terhadap Negara – Negara anggota ASEAN agar ikut serta dalam penandatanganan, meratifikasi dan berpartisipasi terhadap seluruh

pertemuan dan kesepakatan penolakan terhadap terorisme yang penting seperti Konvensi Internasional untuk Pemeberatasan dan Pendanaan Terorisme.

Semenjak tahun 2002 ASEAN sudah mengarah ke konsentrasi dalam menyelenggarakan tindakan untuk membentuk rancangan kerja hukum regional yang berfungsi sebagai penghubung undang – undang tentang penolakan aksi terorisme sebagai dasar dala melakukan kerjasama antara Negara ASEAN. Pada bulan Mei tahun 2002, terjadi penandatanganan *Agreement on Exchange and Establishment of Communication Procedures* yang dilakukan oleh pemerintah Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Perjanjian berisi tentang komitmen untuk menyebarkan daftar penumpang dalam setiap penerbangan, blacklist, serta data sidik jari orang – orang secara komputerisasi. Selain itu juga diadakan pelatihan gabungan antar negara serta untuk memperkuat pengawasan perbatasan antar Negara menggunakan rancangan sistem keluar dan masuk yang memiliki standar yang baik.

Berselang satu tahun pada tahun 2003, Kamboja, Thailand, dan Brunei juga mengikutsertakan diri untuk bergabung dalam sistem yang telah dibuat. Para kepala negara yang negaranya menjadi anggota ASEAN juga ikut serta berkontribusi untuk mengadakan *Ad Hoc Experts Group Meeting* serta tahap pertemuan khusus dari AMMTC dan SOMTC yang berfokus pada pengkajian tentang kasus terorisme dan mengajak untuk menandatangani ratifikasi awal dalam kesepakatan anti terorisme, penjelasan serta bertukar informasi. Selain itu, juga melakukan peningkatan dalam kerjasama dan koordinasi antara AMMTC beserta substansi ASEAN yang lain untung memerangi terorisme dalam tingkat regional maupun global. Jika ancaman atas terorisme yang terjadi dengan sifat regional merupakan tindakan yang memerlukan respon bersama yang dilakukan oleh ASEAN dalam mengatasinya.

Pada Mei 2002, Malaysia sebagai tuan rumah ASEAN *Ministerial Meeting on Terrorism*. Pertemuan tersebut saat itu menghasilkan keputusan untuk menekan persatuan yang bersatu padu antar negara – negara anggota ASEAN supaya dengan efektif dapat memberantas dan memerangi aksi terorisme di wilayah Asia Tenggara. ARF melaksanakan rapat tahunan tentang *Intersessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime (ISM CT-TC)* yang diadakan di Malaysia. Sahabat ASEAN yang ikut serta dalam pertemuan ini yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, China, Jepang, Rusia, dan Australia. Pada pertemuan tersebut membahas tentang langkah – langkah secara spesifik dalam meningkatkan penjagaan di perbatasan serta standarisasi dokumen dalam setiap perjalanan dan pemakaian paspor biometrik. ASEAN sudah membentuk jalur koordinasi bersama dengan sumber kekuatan dunia, seperti yang telah disampaikan pada forum ISM CT-TC, ASEAN telah menyetujui deklarasi bersama dalam berperang melawan terorisme bersama Uni Eropa yang dilakukan pada Januari 2003, India yang dilakukan pada Oktober 2003, Rusia yang dilakukan pada Juni 2004, dan Australia yang dilakukan pada Juni 2004. ASEAN juga mengadakan pertemuan perdana bersama dengan menteri – menteri yang berasal dari negara Jepang, China, dan Korea Selatan (AMMTC+3) untuk membahas isu kejahatan transnasional pada Januari tahun 2004. Hasil utama yang dicapai oleh ASEAN dalam berkampanye untuk memberantas terorisme yaitu munculnya sebuah deklarasi *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* di tahun 2007.

ACCT merupakan sebuah deklarasi yang mengikat antar negara anggota ASEAN untuk berkomitmen agar melakukan perang melawan terhadap aksi terorisme. Perangkat yang telah dibuat di dalam ACCT merupakan penguatan hubungan kerjasama regional anggota antar anggota ASEAN, seperti bantuan hukum kerjasama dalam

permasalahan pidana atau kemungkinan terjadi proses ekstradisi pelaku terorisme. Konferensi ASEAN yang membahas Pemberantasan Terorisme adalah salah satu usaha dalam meningkatkan kerjasama keamanan bersama Negara – Negara yang merupakan anggota ASEAN untuk memberantas tindakan – tindakan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Konferensi tersebut sudah ditandatangani oleh negara – Negara yang merupakan anggota ASEAN di Filipina pada tanggal 13 Januari 2007 saat KTT ASEAN ke-12.

Dasar – dasar yang terkandung dalam konferensi ASEAN yang membahas berperang melawan tindakan terorisme yaitu mengenai hal – hal untuk menghormati kedaulatan dalam integritas wilayah, tidak ikut campur kepentingan dalam negeri, adanya hukum timbal balik antar negara, dan lebih mementingkan untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Dalam konferensi tersebut terkandung prinsip yang menjadi poin lebih yang tak terdapat dalam konferensi tentang pemberantasan aksi terorisme lain, yakni ketetapan tentang program deradikalisasi terhadap pelaku yang melakukan aksi terorisme, memberi perlakuan terhadap pelaku terorisme secara adil dan manusiawi, serta menghormati hak asasi manusia pada saat proses penanganan. (Repository USU)

Akan tetapi ASEAN belum mempunyai peran yang menonjol untuk berupaya menangani kasus terorisme kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Meskipun ASEAN sudah mendirikan persatuan yang bersifat mengikat dalam *ASEAN Community*, tanggapan dari pihak ASEAN saat menanggapi aksi terorisme Kelompok Abu Sayyaf di Filipina sebatas dalam tingkat nasional dan sub regional. Kurangnya penerapan ASEAN untuk menangani aksi terorisme di level regional secara mengikat secara umum terhadap Negara – Negara anggota ASEAN, yang menjadikan para negara anggota ASEAN untuk lebih memilih cara hubungan bilateral maupun trilateral karena dengan cara tersebut

terjadi karena adanya kepentingan kerjasama antar masing – masing negara yang berhubungan. Terdapat suatu hubungan kerjasama trilateral yang terjadi antara Filipina, Indonesia, dan Malaysia terhadap respon kepada kelompok terorisme Abu Sayyaf. Hubungan tersebut berisi tentang perlawanan terhadap aksi terorisme. Selain itu, juga terdapat tindakan yang dilakukan oleh negara anggota dengan memakai strategi keamanan dengan caranya sendiri serta lebih untuk melakukan kerjasama dengan pihak diluar ASEAN dalam melawan tindakan terorisme. Dapat dicontohkan keputusan yang diambil oleh pemerintah Filipina untuk menangani aksi terorisme Abu Sayyaf dengan melakukan kerjasama pemberantasan terhadap terorisme dengan pemerintah Amerika Serikat daripada dengan negara ASEAN yang lain.

Dalam upaya menambah kekuatan militer untuk memberantas Kelompok Abu Sayyaf para anggota ASEAN belum memiliki pendapat yang serupa dalam menangani kasus terorisme. Hal tersebut dikarenakan para negara anggota ASEAN mempunyai pandangan tentang terorisme masih bersumber pada kepentingan nasional negaranya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari negara anggota yang mengalami dampak langsung dari aksi yang dilakukan oleh Abu Sayyaf dengan negara yang tidak terkena dampak. Anggota yang tak terkena dampak Abu Sayyaf tidak mau melakukan kerjasama. Karena hal tersebut membuat ASEAN belum bisa memberi koordinasi kepada seluruh Negara anggotanya dalam bertindak melawan aksi terorisme secara bersama. (I Made Adi Lesmana, 2017)

C. Marjinalisasi Kelompok Abu Sayyaf

Sejak pertama kali Kelompok Abu Sayyaf berdiri sebenarnya kelompok tersebut sudah menjadi sebuah kelompok yang bersifat marjinal dapat memiliki arti yaitu hanya sebuah kelompok kecil. Kelompok Abu Sayyaf yang

tumbuh dari dalam sebuah kelompok kecil yaitu MILF. Sebuah kelompok yang memiliki sifat separatis militer dengan basis Islam. Abu Sayyaf ini juga memiliki sifat yang radikal yaitu dengan melakukan tindakan yang tidak seperti dengan norma agama Islam karena mengacu pada tindakan yang ekstrim. Sebenarnya jika dilihat dari segi kuantitas Abu sayyaf sangatlah kecil, sebuah kelompok separatis Islam yang memiliki tujuan utama untuk mendirikan sebuah Negara merdeka berhukum Islam.

Karena munculnya sebuah kelompok separatis yaitu Kelompok Abu Sayyaf, Pemerintah memberikan perlawanan terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf. Pemerintah Filipina menggunakan cara perdamaian ataupun perang untuk melawan Abu Sayyaf. Pada tahun 1996 terjadi sebuah perjanjian damai antara pemerintah Filipina dengan organisasi – organisasi Islam Moro termasuk juga dengan Abu Sayyaf. Akan tetapi, Abu Sayyaf masih tidak terima dengan hasil keputusan perjanjian damai tersebut dan cenderung menolak. Kelompok Abu Sayyaf masih menginginkan untuk bertindak dengan cara berjuang menggunakan senjata (perang). Lalu, Pemerintah Filipina menanggapi apa yang diinginkan oleh Abu Sayyaf tersebut yaitu dengan melakukan tindakan yang keras. Pemerintah Filipina melakukan pendekatan menuju ke Mindanao yang merupakan daerah dengan mayoritas Muslim tersebut. Pemerintah Filipina melakukan pendekatan tersebut bersama dengan kekuatan militernya yang memiliki tujuan untuk memerangi dan memberantas kelompok radikal Abu Sayyaf. Pemerintah Filipina memikirkan bahwa cara tersebut merupakan cara yang paling tepat dan efektif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan bangsa Moro. Kelompok Abu Sayyaf yang melakukan perlawanan dan perjuangannya sendiri maka Pemerintah Filipina dapat dengan sangat mudah untuk menghentikan dan memberantas Kelompok Abu Sayyaf tersebut. (Gofur, 2016)

Selain melawannya sendiri, Pemerintah Filipina juga melakukan kerjasama dengan pemerintah dari negara lain di dunia. Yang pertama yaitu melakukan hubungan kerjasama dengan Pemerintah Amerika Serikat. Sebenarnya hubungan kerjasama antara Filipina dan Amerika Serikat sudah terjadi sejak lama. Akan tetapi, hubungan kerjasama dalam menanganani kasus terorisme baru terjadi pada November tahun 2001. Pada saat itu Presiden Filipina Gloria Macapagal melakukan perjalanan menuju Amerika Serikat. Kedua Negara sepakat melakukan kesepakatan perjanjian yang bergerak dalam kerjasama militer, yang di mana kerjasama tersebut dilakukan sebagai salah satu tindakan untuk membantu Filipina yang dilakukan Amerika Serikat dalam menangani kasus terorisme. Kesepakatan tersebut muncul karena sebelumnya Amerika Serikat mengalami tragedy WTC 9/11 pada September 2001. Perjanjian tersebut juga merupakan bantuan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Filipina untuk memerangi Kelompok Radikal Abu Sayyaf. (AsSakir, 2017)

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara tersebut menghasilkan sebuah program bernama *Balikatan Exercise 2002-01* atau sering disebut dengan Program Balikatan 02-1. Presiden Filipina yaitu Gloria Macapagal Arroyo meminta kepada Amerika peralatan militer yang baru serta meminta pelatihan terhadap pasukan militer Filipina agar kemampuan dalam berperang melawan Kelompok Abu Sayyaf lebih baik lagi. Dalam Balikatan 02-1 ini Amerika Serikat ikut serta berperan menjadi penasehat untuk Filipina yang bertujuan untuk memberantas Kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Program tersebut dilakukan di daerah Mindanao, lebih tepatnya berada di Pulau Basilan, yang merupakan basis dari Kelompok Abu Sayyaf.

Karena adanya program Balikatan 02-1 berhasil untuk membunuh salah satu pemimpin dari Kelompok Abu Sayyaf yaitu berhasil membunuh Abu Sabaya pada Juni 2002 di Pantai Sibuco, Zamboanga Del Norte. Dilaporkan juga

bahwa program tersebut dengan cepat dapat mengurangi kekuatan dari Kelompok Abu Sayyaf di Pulau Basilan. Kelompok Abu Sayyaf yang hanya mempunyai kekuatan dengan jumlah 1270 anggota aktif Pada tahun 2000, akibat / dampak dari program Balikatan 02-1 dapat mengurangi kekuatan dari Kelompok Abu Sayyaf yang berkurang menjadi lebih sedikit yaitu hanya berjumlah 460 anggota saja yang masih aktif di wilayah Pulau Basilan. (Gumilar, 2013)

Setelah kematian pendiri beserta pemimpin pertama dari Abu Sayyaf yaitu Abdulrajak Janjalani, tongkat kepemimpinan dari Abu Sayyaf diwariskan kepada adik dari Janjalani yaitu Khadafy Janjalani. Akan tetapi, Khadafy tidak seperti kakaknya yang memiliki jiwa kepemimpinan yang berkarisma dan tegas. Pada saat pergantian pemimpin, Kelompok Abu Sayyaf terbagi menjadi dua kelompok besar yang pertama memiliki basis perjuangan di kepulauan Sulu dan yang kedua berbasis di kepulauan Basilan yang melakukan perjuangannya secara masing – masing. Pada tahun 2002, dilaporkan bahwa kelompok yang berada di Basilan mempunyai 10 faksi bersenjata serta untuk kelompok dengan basis Sulu terdapat 16 faksi bersenjata. Khadafy Janjalani yang memimpin di kawasan Basilan, akan tetapi dia dalam Abu Sabaya (Aldam Tilao) dengan bertindak untuk melakukan aksi penculikan untuk meminta uang tebusan. Sedangkan untuk kelompok yang ada di Sulu dipimpin oleh Ghalib Andang (Commander Robot) yang juga beraksi dengan cara menculik dan meminta tebusan (Kidnapped for Ransom Activities.)

Karena munculnya konflik internal yang terjadi di dalam tubuh Kelompok Abu Sayyaf serta terbaginya Kelompok Abu Sayyaf menjadi dua kubu yang terpisah. Maka dari itu, Pemerintah Filipina bersama pasukan militer Filipina dengan cepat memanfaatkan perpecahan tersebut. Pasukan militer Filipina melaksanakan penyerangan militer secara intensif terhadap Abu Sayyaf. Dengan melakukan

tindakan tersebut pemerintah Filipina dapat memangkas kekuatan dari kelompok Abu Sayyaf sebanyak 70%. Tercatat dari total anggota sebanyak 1.269 orang di tahun 2000 dapat berkurang secara drastis yaitu hanya terdapat sekitar 350 anggota yang terhitung pada tahun 2005. (Wibisana, 2016) Oleh karena itu, pergerakan yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf pun semakin sempit. Kelompok Abu Sayyaf pun hanya menguasai wilayah perairan dan daratan di kawasan Pulau Sulu dan Pulau Basilan di Mindanao. Kelompok Abu Sayyaf tidak lagi berani untuk melakukan aksi secara terbuka. Kelompok tersebut hanya melakukan aksi dengan cara gerilya seperti melakukan tindakan penculikan, penyanderaan, dan pembunuhan yang dilakukan secara sembunyi – sembunyi.